PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

- 1. Pengertian Sistem Filsafat
- 2. Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem
- 3. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat
- 4. Pancasila sebgai Nilai Fundamental Negara

1. Pengertian Sistem Filsafat

A. Pengerrtian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan, yang bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya saling berkaitan, saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan merupakan keseluruhan yang utuh. Pancasila adalah sebuah sistem karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Esensi seluruh sila-silanya juga merupakan suatu kasatuan. Pancasila berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu.

- Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
 - 1. Suatu kesatuan bagian bagian
 - 2. Bagian-bagian itu memiliki fungsi sendiri
 - 3. Saling berhubungan /ketergantungan
 - 4. Untuk mencapai tujuan bersama:

Hubungan manusia dengan Tuhan,

Hubungan manusia dengan manusia

Hubungan manusia dengan masyarakat

Hubungan manusia dengan alam

B. Pengertian Filsafat

Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani *Philein*: cinta

Sophos: hikmah/kebijaksanaan

Filsafat : Cinta kebijaksanaan

Filsafat: Pandangan hidup yang dianggap paling benar.

Keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut.

- 1. Filsafat Sebagai Produk, mencakup 2 pengertian
- a. Pengertian filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filosof pada zaman dahulu
- b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat
- 2. Filsafat Sebagai Proses

Merupakan aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu masalah dengan metode tertentu dengan berbagai persoalannya dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai objeknya.

2. Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat

A. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila bersifat Organis

Pada hakikatnya bersumber pada hakikat dasar manusia sebagai pendukung inti, yaitu 'monopluralis' yang memiliki unsur-unsur, 'susunan kodrat' jasmani-rokhani, 'sifat kodrat' individu-makhluk sosial, dan 'kedudukan kodrat' sebagai pribadi berdiri sendiri- makhluk TYME.

B. Susunan Pancasila Bersifat Hierarkhis dan Piramida

 Kesatuan sila-sila pancasila memiliki susunan hierarkhis piramidal maka sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan serta berkeadilan sosial sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.

Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal

- * Sila pertama, menjiwai sila-sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
- * Sila kedua, dijiwai sila Ketuhanan meliputi dan menjiwai sila persatuan, sila berkerakyatan dan keadilan sosial.
- * Sila ketiga, dijiwai sila Ketuhan dan kemanusiaan, menjiwai sila kerakyatan dan keadilan.
- * Sila keempat, dijiwai oleh sila Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan menjiwai saila keadilan.
- * Sila kelima, diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan

C. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi

- Hakikatnya sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, akan tetapi pada setiap sila terkandung keempat sila lainya. Dengan kata lain setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.
- Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi :
- 1) **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,** adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berperisatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa,berperisatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Sila Persatuan Indonesia, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa,berkemanusiaan yang adil dan beradab,berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berperisatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berperisatuan Indonesia dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

3. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat

A. Dasar Antropologis (ilmu tentang manusia)

Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melankan satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis.

B. Dasar Epistemologi (dasar-dasar ilmu pengetahuan)

Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Epistemologis merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya yaitu tentang hakikat manusia.

Menurut Titus (1984:20) Epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Dalam epistemoligi terdapat tiga persoalan yang mendasar:

- 1. tentang sumber pengetahuan mnusia
- 2. teori kebenaran pengetahuan manusia
- 3. watak pengetahuan manusia

C. Dasar Aksiologis

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan.

- Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Menurut Notonegoro, nilai-nilai tersebut dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :
- a. Nilai Material: segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- b. **Nilai Vital**: segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan.
- c. Nilai Kerohanian: segala sesuatu yang berguna bagi rohani
 manusia yang dapat dibedakan atas empat tingkatan sebagai berikut :
 - 1. Nilai kebenaran: nilai yang bersumber pada akal, rasio, budi atau cipta manusia.
 - 2. Nilai keindahan/estetis: nilai yang bersumber pada perasaan manusia.
 - **3. Nilai kebaikan/moral**: nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia
 - **4. Nilai religius**: nilai kerohanian tertinggi dan bersifat mutlak yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia serta bersumber pada wahyu Tuhan Yang Maha Esa.

4. Pancasila sebagai Nilai Fundamental Negara

A. Dasar Pilosopis

Pancasila sebagai filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis fundamental dan menyeluruh. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemsyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (legal society).

Selain itu secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif.

Nilai Objektif Pancasila

- 1. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan sifat-sifat universal dan abstrak.
- 2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa baik dalam ada kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan.
- 3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bergantung pada bangsa Indonesia sendiri, seperti berikut.

- 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia
- 2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia .
- 3. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerokhanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius.

B. Nilai-nilai Pancasila sebagai fundamental

 Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan suatu sumber dari segala hukum dalam negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara epersatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan sila ketiga.

Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara merupakan hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima.

Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini sebagai penjabaran sila keempat.

Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa, negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

